

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dinamika Politik

2.1.1 Dinamika Politik

Interaksi, konflik, negosiasi, serta kompromi merupakan proses pada dinamika politik yang terjadi di berbagai aktor pada arena politik, terkhusus pada konteks perumusan serta implementasi kebijakan publik (Salukh *et al.*, 2023). Dinamika dalam bahasa Yunani *dynamikos* berarti kekuatan ataupun gerakan, dengan itu dinamika politik merupakan gerakan ataupun perubahan yang telah terjadi pada relasi kekuasaan antara aktor politik.

Dinamika politik dalam studi politik kontemporer merupakan proses kompleks dan tidak linear, di mana beberapa aktor dengan kepentingan, sumber daya, serta strategi yang berbeda saling berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi hasil kebijakan. Dinamika politik menurut (Peters & Zittoun, 2021) bukan hanya sekedar proses teknis atau administratif, tetapi arena pertarungan untuk kekuasaan dengan melibatkan negosiasi, koalisi, konflik serta kompromi.

Konsep terkait dinamika politik tidak hanya mencakup pertanyaan mendasar tetapi disini Harold Lasswell memiliki pertanyaan yang mendasar dan sampai saat ini tetap relevan seperti “*who gets what, when, and how?*” pertanyaan ini menggarisbawahi bahwa politik

sebenarnya tentang distribusi kekuasaan serta sumber daya yang tidak pernah merata. Oleh karena itu, politik selalu menimbulkan konflik juga negosiasi dari berbagai belah pihak.(Cairney & Weible, 2022).

Selain itu, (Anderson, 2020) menambahkan pemahaman terkait dinamika politik melalui pernyataan bahwa kebijakan bukanlah produk teknis yang netral, melainkan dari “*political struggle*” yang berarti pertarungan politik diantara aktor yang memiliki kepentingan, ideologi, juga sumber daya yang berbeda. Pada konteks ini, (Birkland, 2020) memberikan argumen ia memahami dinamika politik tidak hanya melihat apa yang telah diputuskan, tetapi juga apa yang tidak diputuskan, siapa yang terlibat serta siapa yang dikecualikan, dan kepentingan apa yang telah dimenangkan serta kepentingan apa yang diabaikan.

Proses kebijakan menekankan bahwa dinamika politik melibatkan beberapa elemen kunci:

- 1) Aktor yang beragam dengan kepentingan yang sering bertentangan
- 2) Informasi yang tidak sempurna dan sering dipolitisasi
- 3) Institusi yang membentuk aturan main dalam interaksi politik
- 4) Konteks yang berubah-ubah (ekonomi, sosial, budaya)
- 5) Waktu sebagai faktor yang mempengaruhi momentum politik Oleh karena itu, memahami dinamika politik berarti memahami:
- 6) Siapa aktor yang terlibat dalam proses kebijakan;
- 7) Kepentingan apa yang mereka perjuangkan

- 8) Sumber daya kekuasaan apa yang mereka miliki (uang, informasi, legitimasi, jaringan)
- 9) Strategi apa yang mereka gunakan untuk mempengaruhi keputusan
- 10) Hasil akhir seperti apa yang diperoleh dari interaksi antar-aktor tersebut
- 11) Konteks politik yang mempengaruhi jalannya proses kebijakan

2.1.2 Dimensi-Dimensi Dinamika Politik

Ada beberapa dimensi penting dalam dinamika politik kebijakan publik:

1. Dimensi Aktor (*Actor Dimension*)

Dimensi ini mengkaji siapa saja yang terlibat dalam proses kebijakan. (Cairney & Weible, 2022) mengklasifikasikan aktor kebijakan menjadi:

Aktor negara:

- 1) Eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota)
- 2) Legislatif (DPR/DPRD)
- 3) Yudikatif
- 4) Birokrasi (pejabat teknis, dinas)

Aktor non-negara:

- 1) Partai politik
- 2) Kelompok kepentingan dan kelompok penekan

- 3) Organisasi masyarakat sipil (CSO, NGO)
- 4) Media massa.
- 5) Akademisi dan lembaga riset
- 6) Sektor swasta dan korporasi

Aktor masyarakat:

- 1) Komunitas lokal
- 2) Gerakan sosial
- 3) Publik individual

Pada konteks Indonesia pentingnya mempertimbangkan aktor yang informal seperti tokoh agama, tokoh adat, juga oligarki lokal yang aktor informal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam dinamika politik kebijakan.

2. Dimensi Kepentingan (*Interest Dimension*)

Dimensi ini mengkaji motivasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing aktor. Dengan mengidentifikasi beberapa jenis kepentingan:

- 1) Kepentingan material: keuntungan ekonomi, akses terhadap sumber daya, peningkatan pendapatan.
- 2) Kepentingan politik: kekuasaan, legitimasi, dukungan elektoral, citra politik
- 3) Kepentingan ideologis: nilai, norma, keyakinan tentang bagaimana seharusnya kebijakan dijalankan
- 4) Kepentingan institusional: menjaga atau memperluas

pengaruh institusi

- 5) Kepentingan simbolik: status, pengakuan, identitas Dalam praktiknya kepentingan aktor ini sering bersifat tumpang tindih atau multipel, maka analisis kepentingan harus dilakukan secara kontekstual dan tidak biner.

3. Dimensi Kekuasaan (*Power Dimension*)

Pada dimensi kekuasaan ini kekuasaan di distribusi pada aktor-aktor yang terlibat. Pada buku Lukes edisi ketiga yang telah direvisi mengembangkan konsep “tiga dimensi kekuasaan” tetap menjadi kerangka analisis yang paling komprehensif.

1) Kekuasaan dimensi pertama (*visible power/overt power*):

Proses pengambilan keputusan formal, seperti voting, debat publik, ataupun penetapan kebijakan merupakan kekuasaan pada dimensi pertama. Pada dimensi ini merupakan bentuk kekuasaan yang mudah diamati karena terjadinya pada ruang publik.

2) Kekuasaan dimensi kedua (*hidden power/covert power*):

Pada dimensi kedua ini kekuasaan digunakan untuk menentukan agenda politik, seperti kemampuan untuk memutuskan isu mana yang harus dibahas maupun isu mana yang seharusnya tidak dibahas. Ini disebut juga sebagai dua wajah kekuasaan.

3) Kekuasaan dimensi ketiga (*invisible power/ideological power*):

Pada dimensi kekuasaan digunakan untuk membentuk

persepsi masyarakat sehingga mereka menerima situasi yang sebenarnya situasi itupun merugikan mereka tanpa melakukan perlawanan. Kekuasaan disini paling efektif karena tidak terlihat dan tidak menimbulkan resistensi. Kekuasaan ideologis ini relevan pada saat ini era digital dimana kontrol narasi melalui media massa menjadi sangat penting.

Dimensi keempat ditambahkan oleh (Flyvbjerg, 2023) pada analisis kekuasaan kontemporer, yaitu “*algorithmic power*” dengan kekuasaan yang dipegang oleh mereka yang mengontrol algoritma bahkan data digital, yang saat ini sangat relevan dalam konteks kebijakan digitalisasi seperti “Sapawarga”.

4. Dimensi Proses (*Process Dimension*)

Dimensi ini mengkaji bagaimana keputusan dibuat. (Howlett *et al.*, 2020) mengidentifikasi beberapa aspek penting:

- 1) Mekanisme pengambilan keputusan
- 2) *Top-down* (hierarkis, dari elite ke massa)
- 3) *Bottom-up* (partisipatif, dari massa ke elite)
- 4) *Hybrid* (kombinasi keduanya)

Tahapan kebijakan:

- 1) Agenda-setting (penentuan masalah yang akan ditangani)
- 2) Formulasi (perancangan alternatif kebijakan)
- 3) Adopsi (pengambilan keputusan resmi)

4) Implementasi (pelaksanaan di lapangan)

5) Evaluasi (penilaian hasil dan dampak)

Partisipasi stakeholder:

1) Siapa yang dilibatkan dan pada tahap apa

2) Seberapa besar pengaruh mereka terhadap keputusan

3) Apakah partisipasi bersifat substantif atau simbolik

5. Dimensi Hasil (*Outcome Dimension*)

Dimensi ini meneliti siapa yang mendapatkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan, serta biaya dan manfaatnya dibagi di antara berbagai kelompok masyarakat. Konsep (*social construction of target populations*) yang dikembangkan oleh Schneider dan Ingram menjelaskan bahwa kebijakan publik sering dipengaruhi oleh persepsi elit mengenai kelompok mana yang berhak mendapatkan manfaat dan mana yang harus menanggung beban.

2.1.3 Dinamika Politik dalam Kebijakan Publik

Dinamika politik dalam konteks kebijakan publik modern menunjukkan proses yang tidak selalu berjalan secara linier dan rasional. Dalam pandangan (Smith & Larimer, 2022) pembuatan kebijakan publik cenderung lebih mencerminkan (*political rationality*) daripada (*technical rationality*). Keputusan kebijakan tidak selalu didasarkan pada analisis *cost-benefit* yang objektif, melainkan lebih pada kalkulasi politik tentang siapa yang mendukung, siapa yang menentang, dan cara memaksimalkan dukungan politik sambil

mengurangi resistensi. Teori (*policy punctuations*) berargumen bahwa perubahan dalam kebijakan politik tidak bersifat kontinu dan bertahap, melainkan melalui periode stabilitas yang panjang yang kemudian diikuti oleh perubahan mendadak akibat krisis atau pergeseran koalisi politik yang signifikan. Penjelasan ini menunjukkan mengapa sebagian kebijakan bisa bertahan lama meskipun tidak efektif, sementara yang lain bisa berubah secara drastis dalam waktu yang sangat singkat.

Dalam (*Advocacy Coalition Framework*) yang diperbarui, (Weible & Sabatier, 2023) menegaskan bahwa proses pembelajaran di antara aktor-aktor kebijakan turut berperan dalam dinamika politik kebijakan. Mereka menyatakan bahwa meskipun kepentingan dan ideologi aktor relatif konsisten, mereka dapat menyesuaikan strategi dan keyakinan tertentu berdasarkan pengalaman dan data baru yang mereka peroleh selama proses kebijakan. Dalam memahami dinamika politik dalam kebijakan publik, penting untuk mengadopsi pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek formal-legal atau teknis-administratif, tetapi juga memperhatikan relasi kekuasaan, kepentingan tersembunyi, strategi politik aktor, serta konteks politik yang lebih luas yang mempengaruhi proses kebijakan.

2.2 Kebijakan Publik

Topik diskusi yang menarik dan kompleks ialah definisi singkat dari kebijakan. Selain itu, proses berpikir dan dikenal serta telah diterapkan sejak lama dalam sejarah peradaban manusia merupakan definisi tersendiri dari

kebijakan itu. Kebijakan publik merupakan istilah yang sering kita jumpai baik dalam konteks akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ialah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggambarkan berbagai kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini juga hampir setiap saat disamakan dengan tujuan, program, keputusan, standar. Secara lebih umum, kebijakan merupakan tindakan seorang maupun berbagai aktor dalam bidang tertentu.

Kebijakan publik juga merupakan suatu kebijakan yang datang dari pemerintah dan fenomena yang tidak dapat dihindari dan sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kebijakan publik ialah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bersama dan bersifat mengikat bagi warga, serta harus dipatuhi. Tujuan dari kebijakan publik itu sendiri merupakan untuk mengatur kehidupan bersama serta mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati oleh masyarakat dan elemen lainnya. Kebijakan publik juga harus ditaati oleh individu maupun kelompok yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan suatu permasalahan publik yang terjadi di suatu lingkungan tersebut.

2.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

E-government, yang merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Transformasi digital dalam pemerintahan yang dikenal sebagai *e-*

government mencakup integrasi sistem informasi dan proses kerja pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya sekadar digitalisasi dokumen atau pembuatan website pemerintah, konsep ini juga melibatkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara, sektor bisnis, dan lembaga pemerintah melalui platform digital yang terintegrasi. (Akhyar *et al.*, 2024).

Perkembangan *e-government* mengalami evolusi melalui beberapa tahapan. Di tahap pertama, pemerintah mulai membangun kehadiran online melalui penyediaan informasi dasar, yang disebut *emerging presence*. Pada tahap kedua, diperkenalkan *enhanced presence* yang menyajikan informasi lebih interaktif dan dinamis. *Transactional presence* merupakan tahap ketiga di mana masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi online seperti pembayaran pajak, perizinan, dan layanan administratif lainnya. *Connected presence* atau *networked presence* merupakan tahap akhir, di mana seluruh sistem pemerintahan terintegrasi secara penuh, memungkinkan pertukaran data secara seamless dan layanan *one-stop service* yang komprehensif. Implementasi *e-government* di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, salah satunya Instruksi Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang menekankan peran transformasi digital dalam meningkatkan kompetitivitas dan kualitas pelayanan publik. (Lestari *et al.*, 2021). Dimensi utama dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi *Government-to-Citizen* yang menitikberatkan pada layanan

langsung kepada masyarakat seperti pembuatan dokumen kependudukan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Implementasi *e-government* yang berhasil sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang cukup, kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola sistem, regulasi yang mendukung, dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan serta kerahasiaan data di platform digital.

Dalam konteks tantangan dan peluang, pengimplementasian *e-government* menghadapi berbagai persoalan yang penting. Kesenjangan digital yang ada antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara generasi muda dan tua, menjadi tantangan dalam memastikan pemerataan akses layanan digital. Perhatian terhadap isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi semakin besar seiring dengan bertambahnya data sensitif yang dikelola secara digital. Di sisi lain, *e-government* menyediakan peluang besar untuk memperkuat transparansi melalui data terbuka dan pemerintahan terbuka, mengurangi praktik korupsi dengan meminimalkan kontak langsung dalam pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan melalui platform konsultasi digital. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, banyak negara mempercepat implementasi *e-government*, menegaskan pentingnya sistem pemerintahan digital yang andal untuk keberlangsungan layanan publik selama masa krisis. (Lestari *et al.*, 2021). Perkembangan terbaru dalam *e-government* mengarah ke konsep *smart government* yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan, analisis big data, *Internet of Things*, dan *blockchain* untuk membangun sistem

pemerintahan yang lebih prediktif, proaktif, dan personal. Tren yang semakin berkembang meliputi penggunaan chatbot berbasis AI untuk layanan informasi publik, analisis big data untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta implementasi blockchain untuk memperkuat keamanan dan transparansi transaksi pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan implementasi *e-government*, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan aspek teknologi, perubahan budaya organisasi, pengembangan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan digital pemerintah.

2.4 Teori Redistribusi dan Rekognisi Nancy Fraser

Sebagai filsuf politik kontemporer, Nancy Fraser (Fraser, 2022) mengembangkan kerangka teori keadilan sosial yang lengkap dengan menekankan konsep redistribusi dan rekognisi. Landasan teori ini sangat penting untuk memahami kerumitan ketidakadilan yang ada di masyarakat kontemporer, khususnya dalam mengkaji keterkaitan antara ketidakadilan ekonomi dan budaya serta pentingnya pendekatan solusi yang terintegrasi. Menurut Fraser, untuk mewujudkan keadilan sosial yang otentik, tidak cukup hanya mengatasi ketimpangan ekonomi atau mengenali keberagaman budaya secara terpisah, melainkan keduanya harus digabungkan dalam satu pendekatan analitis yang komprehensif.

Fraser dalam teorinya menanggapi diskusi besar dalam filsafat politik kontemporer, yaitu antara paradigma redistribusi yang menitikberatkan

keadilan distributif dan paradigma rekognisi yang menekankan politik identitas. Fraser menolak untuk menentukan pilihan dan justru menegaskan bahwa keduanya adalah dimensi yang saling berhubungan dan sama pentingnya untuk memperjuangkan keadilan sosial. Pendekatan integratif Fraser ini berkontribusi secara penting dalam mengurai kompleksitas ketidakadilan yang dihadapi oleh berbagai kelompok marginal di masyarakat modern. (Fraser, 2022)

2.4.1 Konsep Redistribusi

Redistribusi adalah konsep keadilan distributif yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya ekonomi dan material di masyarakat. Berdasarkan pandangannya, Fraser mengidentifikasi bahwa ketidakadilan redistribusi muncul dari struktur ekonomi-politik yang memunculkan eksploitasi, marginalisasi ekonomi, dan deprivasi material. Ketidakadilan ini bersifat tidak hanya individual, tetapi juga struktural, yang tertanam dalam sistem ekonomi masyarakat dan menimbulkan pembagian kelas yang tidak adil.

Redistribusi mencakup berbagai aspek ketidakadilan ekonomi, termasuk eksploitasi tenaga kerja yang hasil kerjanya diambil oleh orang lain marginalisasi ekonomi yang membatasi kelompok tertentu dalam pekerjaan yang tidak diinginkan atau bergaji rendah serta deprivasi yang menolak standar hidup material yang layak. Fraser menekankan bahwa mengatasi ketidakadilan redistribusi memerlukan perubahan mendalam dalam struktur ekonomi-politik, bukan sekadar

transfer uang atau bantuan sosial yang bersifat sementara. Pendekatan terhadap ketidakadilan redistribusi dapat dilakukan secara afirmatif maupun transformatif. Pendekatan afirmatif berfokus pada memperbaiki hasil yang tidak adil tanpa melakukan perubahan pada kerangka dasar, misalnya program kesejahteraan negara yang memberikan bantuan kepada kelompok miskin tanpa mengubah struktur ekonomi yang menghasilkan kemiskinan. Dalam pendekatan transformatif, fokusnya adalah mengubah struktur ekonomi dasar melalui redistribusi besar-besaran kepemilikan alat produksi atau perubahan mendasar dalam sistem pembagian kerja. Karena mampu mengatasi akar masalah ketidakadilan, Fraser lebih memilih pendekatan transformatif daripada yang hanya menanggulangi gejala. (Fraser, 2020)

2.4.2 Konsep Rekognisi

Dalam konteks keadilan kultural, rekognisi berarti pengakuan dan penghormatan terhadap identitas, perbedaan, serta kontribusi kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi. Disamping itu, disrespect menjadi salah satu bentuk ketidakadilan rekognisi, yang ditandai dengan perlakuan rutin yang merendahkan atau mempermalukan mereka dalam representasi kultural publik maupun dalam interaksi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan Fraser, ketidakadilan kultural berasal dari pola representasi, interpretasi, dan komunikasi sosial yang berlaku

secara dominan. Stereotip negatif ini berkontribusi pada hambatan dalam interaksi sosial yang adil, menciptakan invisibilitas dalam representasi publik yang membuat kelompok tertentu tampak tidak eksis, serta memperkuat penghinaan sistematis terhadap mereka yang memiliki identitas tertentu yang menimbulkan kerusakan terhadap harga diri dan martabat anggota kelompok tersebut. Ketidakadilan kultural berbeda dari ketidakadilan ekonomi yang bersumber dari struktur ekonomi-politik, karena berhubungan dengan pola nilai budaya yang tertanam dalam masyarakat. Sama halnya dengan redistribusi, pendekatan terhadap ketidakadilan rekognisi juga bisa bersifat afirmatif maupun transformatif.

Rekognisi afirmatif berfungsi untuk memperbaiki ketidakrespektan melalui penghargaan terhadap identitas kelompok, misalnya dalam kerangka multikulturalisme mainstream yang merayakan keberagaman tanpa menyelidiki tatanan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Rekognisi transformatif berupaya mengatasi ketidakrespektan dengan mengubah kerangka valuasi budaya yang mendasarinya, seperti melakukan dekonstruksi atau kritik terhadap kategori identitas yang kaku dan membongkar hierarki nilai yang mengistimewakan kelompok tertentu. Fraser kembali menyoroti pentingnya pendekatan transformatif yang tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga mengubah struktur budaya dan menghasilkan subordinasi. (Fraser, 2022).

2.4.3 Integrasi Redistribusi dan Rekognisi

Fraser secara teoretis menegaskan bahwa redistribusi dan rekognisi tidak merupakan dikotomi yang terpisah, melainkan dua dimensi keadilan yang saling terkait dan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Fraser mengemukakan kritik terhadap pandangan yang memandang politik redistribusi dan politik rekognisi sebagai dua paradigma yang saling bertentangan atau eksklusif. Menurutnya, akar dari banyak ketidakadilan terletak pada faktor ekonomi dan budaya secara bersamaan, sehingga diperlukan pendekatan yang menggabungkan kedua aspek tersebut.

Fraser memakai konsep (ketidakadilan *bivalent*) untuk mengilustrasikan keadaan di mana kelompok tertentu mengalami ketidakadilan dalam aspek ekonomi dan budaya secara bersama. Misalnya, ketidakadilan gender menunjukkan dimensi ekonomi yang nyata, seperti perbedaan upah antara pria dan wanita, meningkatnya kemiskinan di kalangan perempuan, dan pemisahan pekerjaan berdasarkan gender. Ketidakadilan gender tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, termasuk stereotip gender yang membatasi peran perempuan, objektifikasi seksual dan pengurangan nilai pekerjaan yang dikaitkan dengan perempuan. Untuk mengatasi ketidakadilan gender, diperlukan baik redistribusi ekonomi maupun perubahan budaya.

Fraser berpendapat bahwa gerakan sosial progresif perlu

menggabungkan tuntutan redistribusi dan pengakuan untuk mencapai keadilan yang transformatif dan menghindari apa yang disebutnya sebagai (*displacement problem*). Ketika politik rekognisi mengalihkan perhatian dari ketimpangan ekonomi, atau sebaliknya, fokus pada redistribusi bisa menyebabkan masalah displacement terkait ketidakadilan kultural. Penggabungan kedua dimensi ini memerlukan pendekatan strategis yang mampu mengatasi ketidakadilan ekonomi dan kultural secara sekaligus, misalnya melalui reformasi yang merombak baik struktur ekonomi maupun tatanan budaya secara bersamaan. (Fraser, 2022)

2.4.4 Relevansi Teori Fraser dalam Analisis Kebijakan “Sapawarga”

Relevansi teori redistribusi, rekognisi, dari Nancy Fraser sangat tinggi dalam mengkaji dinamika politik terkait implementasi kebijakan “Sapawarga” di objek wisata Situ Gede Tasikmalaya. Sebagai platform partisipasi digital masyarakat dalam pengelolaan kebijakan publik, Kebijakan “Sapawarga” merupakan langkah pemerintah daerah untuk mengatasi ketidakadilan dalam ketiga dimensi yang diusulkan Fraser, khususnya terkait pengelolaan sumber daya wisata dan pembangunan ekonomi lokal.

Dalam konteks redistribusi, analisis terhadap kebijakan “Sapawarga” di objek wisata Situ Gede dapat dilakukan dengan melihat pengaruhnya terhadap pembagian manfaat ekonomi dari pariwisata kepada masyarakat setempat. Potensi ekonomi dari pariwisata di Situ

Gede cukup besar, namun yang menjadi perhatian adalah siapa yang mendapatkan manfaatnya dan apakah redistribusi keuntungan tersebut dilakukan secara adil kepada komunitas lokal. Fraser menyoroti bahwa ketidakadilan merupakan proses redistribusi muncul sebagai akibat dari struktur ekonomi-politik yang menimbulkan eksploitasi, marginalisasi ekonomi, dan deprivasi material. Dalam sektor pariwisata, situasi ini muncul ketika pekerja lokal mendapatkan upah rendah dan keuntungan besar dikapitalisasi oleh investor besar, sementara pedagang lokal tersingkir akibat proses komersialisasi. (Christian *et all.*, 2024)

Instrumen kebijakan “Sapawarga” digunakan untuk memperkuat redistribusi yang lebih adil dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan wisata. Masyarakat lokal dapat menggunakan platform digital ini untuk menyampaikan aspirasi terkait distribusi manfaat ekonomi dari pariwisata, misalnya dengan menonjolkan UMKM lokal, mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk warga sekitar, atau menerapkan skema bagi hasil yang melibatkan komunitas. Namun, penting dilakukan analisis kritis untuk mengkaji apakah “Sapawarga” benar-benar berfungsi sebagai mekanisme redistribusi transformatif yang mampu mengubah struktur ekonomi pariwisata, atau hanya bersifat afirmatif yang sekadar memberikan bantuan simbolis tanpa mengubah relasi kuasa ekonomi yang esensial.

Teori Fraser dalam dimensi rekognisi membantu menjelaskan

kebijakan “Sapawarga” berperan dalam mengatasi atau malah memperkuat ketidakadilan kultural terkait pengelolaan wisata Situ Gede. Ketidakadilan dalam pengakuan dalam konteks ini dapat terjadi. Keberadaan yang berbentuk non-rekognisi terhadap pengetahuan masyarakat lokal tentang pengelolaan sumber daya alam, persepsi negatif terhadap masyarakat lokal sebagai penghalang pembangunan pariwisata modern, atau ketidakmampuan menampilkan identitas dan budaya lokal dalam narasi pariwisata yang lebih mengutamakan branding komersial. (Nandkumar Wadhawankar & Gore, 2024)

Sebagai platform partisipatif, “Sapawarga” berpotensi menjadi ruang untuk rekognisi transformatif, yang menghargai suara dan pengetahuan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata. Platform ini memberi masyarakat peluang untuk mengadvokasi pelestarian nilai-nilai budaya lokal, praktik pengelolaan lingkungan tradisional, dan identitas kultural yang khas dari kawasan Situ Gede. Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah pola representasi dan komunikasi di platform “Sapawarga” benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi berbagai kelompok masyarakat, atau justru memperkuat posisi kelompok tertentu. Sebagai contoh, apakah suara dari kelompok marginal seperti, perempuan, petani kecil, dan kelompok ekonomi bawah tidak benar-benar didengar, karena platform ini lebih banyak dikuasai oleh elit lokal dan kelompok kepentingan ekonomi yang lebih besar.

Dinamika politik dari pelaksanaan kebijakan “Sapawarga” dapat dilihat sebagai arena pertarungan antar berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam menentukan cara mewujudkan ketiga dimensi keadilan tersebut. Pemerintah daerah mungkin berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengembangkan sektor pariwisata, sementara investor dan pengusaha tertarik pada keuntungan ekonomi yang dihasilkan, sedangkan masyarakat lokal lebih mengutamakan pelestarian lingkungan dan akses berkelanjutan terhadap sumber daya. Setiap kelompok akan mencoba menggunakan atau memanipulasi platform “Sapawarga” untuk memperjuangkan definisi keadilan yang mendukung kepentingan mereka. Dengan kerangka Fraser, penelitian ini dapat mengungkap *trade-off* dan dilema yang muncul saat menerapkan kebijakan “Sapawarga”. Fraser mengemukakan bahwa strategi afirmatif dan transformatif yang diterapkan dalam satu dimensi bisa bertentangan dengan strategi di dimensi yang berbeda. Sebagai contoh, upaya penekanan pada identitas unik komunitas lokal dapat berlawanan dengan upaya redistribusi yang mengedepankan universalisme dan keadilan ekonomi. Dengan memahami dilema-dilema ini, kita dapat melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan “Sapawarga” dan menemukan potensi untuk perbaikan. (Fraser, 2022)

Lebih jauh lagi, kerangka Fraser mendukung penempatan kebijakan “Sapawarga” dalam kerangka yang lebih besar dari

perubahan tata kelola di era digital. “Sapawarga”, sebagai platform partisipasi digital, sering dipromosikan sebagai alat untuk meningkatkan demokratisasi dan transparansi. Dengan demikian, pemanfaatan teori redistribusi dan rekognisi Nancy Fraser sangat penting dan relevan dalam mengkaji dinamika politik yang terkait dengan kebijakan “Sapawarga” di objek wisata Situ Gede Tasikmalaya. (Fraser, 2022)

2.5 Teori *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky

Teori *street-level bureaucracy* yang dikembangkan oleh (Lipsky, 2010) memberikan perspektif penting tentang kebijakan publik sebenarnya diimplementasikan dalam praktik. Lipsky berpendapat bahwa untuk sepenuhnya memahami kebijakan publik, kita harus mempertimbangkan peran birokrat tingkat jalanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan sehari-hari. *Street-level bureaucracy* adalah pegawai publik yang bekerja langsung dengan warga dan memiliki keleluasaan yang signifikan dalam menjalankan pekerjaan mereka, termasuk guru, petugas polisi, pekerja sosial, dan dalam konteks penelitian ini, pengelola tempat wisata dan staf yang mengoperasikan sistem tiket elektronik di lapangan (Lipsky, 2010). Meskipun mereka berada di bagian bawah hierarki birokrasi, Lipsky menekankan bahwa *street-level bureaucracy* adalah pembuat kebijakan yang sebenarnya (pembuat kebijakan *de facto*) karena keputusan dan tindakan mereka secara langsung membentuk kebijakan dialami oleh publik. Karakteristik utama mereka meliputi bekerja

di bawah tekanan dengan sumber daya terbatas, menghadapi tuntutan yang melebihi kapasitas mereka, berurusan dengan tujuan yang seringkali ambigu atau bertentangan, dan mengelola harapan yang tidak realistis. Dalam kondisi seperti itu, mereka harus menggunakan kebijaksanaan membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi dalam situasi tertentu (Lipsky, 2010).

2.4.5 Konsep Kunci dalam Teori Lipsky

Diskresi mengacu pada kebebasan yang dimiliki birokrat tingkat lapangan untuk memutuskan kebijakan diterapkan dalam situasi tertentu. Diskresi diperlukan karena kompleksitas situasi lapangan, keragaman masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan ambiguitas tujuan kebijakan. Namun, diskresi juga memiliki konsekuensi yang kompleks hal itu dapat memungkinkan fleksibilitas dan responsif terhadap kebutuhan spesifik, tetapi juga membuka pintu bagi ketidakadilan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan (bekkers, 2014) Mekanisme Penanggulangan adalah strategi bertahan hidup yang dikembangkan oleh birokrat tingkat lapangan untuk mengelola tekanan kerja dan keterbatasan sumber daya. Strategi ini meliputi penyederhanaan (mengategorikan klien ke dalam stereotip untuk mempercepat pengambilan keputusan), penjatahan (membatasi akses ke layanan melalui prosedur yang rumit atau waktu tunggu yang lama), pemilahan (memprioritaskan klien yang mudah dilayani dan menghindari kasus-kasus sulit), dan rutinisasi (mengubah situasi

kompleks menjadi prosedur standar). Meskipun strategi-strategi ini dapat dilihat sebagai respons rasional terhadap kondisi kerja yang menantang, strategi-strategi tersebut dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau hasil yang tidak sesuai dengan tujuan formal kebijakan. Kesenjangan Kebijakan Praktik adalah kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat atas dan kebijakan yang diimplementasikan di tingkat bawah. Kesenjangan ini bukan hanya kegagalan implementasi teknis, tetapi konsekuensi struktural dari birokrasi publik beroperasi dalam kondisi yang kompleks dan terbatas. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi ambiguitas tujuan kebijakan, sumber daya yang terbatas, tekanan dari masyarakat yang berbeda dari harapan para pembuat kebijakan, dan nilai-nilai serta kepentingan pribadi para pejabat yang memengaruhi penggunaan kebijaksanaan mereka (Lipsky, 2010).

2.4.6 Relevansi Teori Lipsky

Teori *street-level bureaucracy* Michael Lipsky sangat relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan *e-ticketing* "Sapawarga" di Situ Gede Tasikmalaya. Dalam konteks ini, birokrat tingkat jalanan mencakup pengelola situs wisata Situ Gede, personel yang mengoperasikan sistem *e-ticketing* di lapangan, dan staf dari Disporabudpar yang berinteraksi langsung dengan pedagang kecil dan pengunjung. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pengelola dan

petugas lapangan memiliki keleluasaan untuk mengimplementasikan sistem *e-ticketing*, seperti apakah mereka dapat menyediakan mekanisme alternatif bagi pengunjung yang tidak terbiasa dengan teknologi digital atau berinteraksi dengan pedagang kecil yang terdampak. Teori Lipsky dapat diintegrasikan dengan Teori Redistribusi dan Rekognisi Nancy Fraser untuk menawarkan analisis yang lebih komprehensif. Dari perspektif redistribusi, keleluasaan yang dimiliki oleh *street-level bureaucracy* dapat memengaruhi distribusi akses dan manfaat dari sistem *e-ticketing* jika petugas menggunakan keleluasaan mereka untuk membantu kelompok rentan, distribusi akses menjadi lebih adil. Namun, jika mereka menerapkan mekanisme penyesuaian yang diskriminatif, ketidakadilan redistributif akan meningkat. Dari perspektif pengakuan, cara *street-level bureaucracy* berinteraksi dengan pedagang kecil mencerminkan apakah kelompok ini diakui sebagai pemangku kepentingan yang sah atau mengalami pengabaian yang memperburuk ketidakadilan budaya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Efektivitas implementasi *e-government* dalam pelayanan publik di era digital. Penelitian ini menganalisis kepuasan pengguna dan efisiensi pelayanan setelah menerapkan *e-government* di beberapa daerah di Indonesia. Temuan utama pada penelitian ini yaitu *e-government* meningkatkan waktu dan biaya pelayanan, dan kepuasan pengguna relatif tinggi. Namun, masih ada perbedaan dalam literasi digital antara generasi muda dan lansia,

infrastruktur teknologi di daerah masih menjadi hambatan, dan aspek partisipasi dan transparansi belum optimal. Relevansi dengan Penelitian ini memberikan konteks umum tentang penerapan *e-government* di Indonesia. Namun, prioritas utamanya adalah kepuasan pengguna dan kebutuhan teknis daripada pertimbangan politik. Adapun perbedaan yaitu, Penelitian Rahman dkk menggunakan metode evaluasi-teknis. Studi ini akan menyelidiki hubungan antara kekuasaan dan kepentingan di balik implementasi “Sapawarga” dengan menggunakan metodologi politik kebijakan (Rahman, A. *et. al*, 2021).

Dampak ekonomi digitalisasi destinasi wisata terhadap UMKM lokal. Studi ini melihat digitalisasi sistem pemesanan dan promosi wisata berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di industri pariwisata. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan akses pasar bagi UMKM yang memiliki literasi digital. Namun, UMKM tradisional, seperti pedagang kaki lima dan penjual souvenir tradisional, mengalami penurunan pendapatan karena tidak mampu beradaptasi dengan sistem digital. Terjadi polarisasi ekonomi UMKM modern berkembang, sementara UMKM tradisional termarginalisasi. Untuk mengimbangi keuntungan digitalisasi, program pendampingan dan inklusi digital diperlukan. Perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian Wulandari & Sari berkonsentrasi pada dampak ekonomi. Dan untuk penelitian ini fokus dinamika politik yang akan dibahas adalah siapa yang menentukan kebijakan, kepentingan apa yang bermain, dan proses pengambilan keputusan dilakukan (Wulandari, D., & Sari, N, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata Antara harapan dan kenyataan. Penelitian ini berfokus pada penggunaan mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata Jawa Barat. Temuan utama pada penelitian ini meskipun undang-undang mengamanatkan partisipasi masyarakat, partisipasi dalam praktiknya bersifat simbolik. Forum partisipatif sering didominasi oleh elite lokal, seperti pengusaha dan tokoh masyarakat, dan aspirasi masyarakat kecil, seperti pedagang dan buruh, jarang terakomodasi. Penelitian memiliki hambatan seperti kekurangan akses informasi, dominasi elite, dan kurangnya mekanisme tanggung jawab dan hambatan kultural seperti, budaya paternalistik, kurangnya kesadaran politik Hasil ini sangat penting untuk mengevaluasi keterlibatan masyarakat Situ Gede dalam penerapan “Sapawarga”. Dan ada perbedaan antara penelitian Sunaryo & Suharto berkonsentrasi pada pengorganisasian pariwisata secara keseluruhan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan digitalisasi tertentu (“Sapawarga”) diterapkan di satu objek wisata (Sunaryo, B., & Suharto, E, 2021).

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian dinamika politik yang terlibat dalam implementasi kebijakan *e-ticketing* "Sapawarga" di lokasi wisata Situ Gede di Tasikmalaya. Kerangka ini mengintegrasikan tiga pendekatan analitis yang saling melengkapi analisis dinamika politik untuk memahami interaksi antar aktor dan kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan, analisis birokrasi tingkat akar rumput untuk meneliti kebijakan diubah menjadi praktik di

lapangan melalui kebijaksanaan pejabat, dan analisis keadilan sosial melalui kerangka redistribusi dan pengakuan Nancy Fraser untuk mengidentifikasi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, serta apakah kelompok marginal diakui dan dilibatkan dalam proses kebijakan. Penelitian ini berawal dari fenomena implementasi kebijakan *e-ticketing* "Sapawarga" di Situ Gede, yang diluncurkan tanpa konsultasi publik dengan 60 pedagang kecil yang berpotensi terkena dampak, disertai dengan fragmentasi kewenangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Tasikmalaya, serta peluncuran kebijakan di tengah transisi kepemimpinan. Fenomena ini menciptakan arena dinamika politik yang melibatkan berbagai dimensi interaksi dinamika vertikal antar tingkatan pemerintahan, dinamika horizontal antar lembaga, dinamika antara negara dan pasar, dinamika antara negara dan masyarakat, serta dinamika internal dalam masyarakat. Implementasi kebijakan di lapangan dianalisis melalui teori birokrasi tingkat jalanan untuk memahami para petugas lapangan menggunakan kebijaksanaan mereka, mekanisme penanggulangan apa yang mereka kembangkan, dan sejauh mana terdapat kesenjangan antara tujuan formal

kebijakan dan praktik aktual (kesenjangan kebijakan-praktik). Konsekuensi keadilan sosial dari keseluruhan proses kemudian dianalisis melalui dimensi redistribusi, yang mengkaji distribusi manfaat ekonomi, dan dimensi pengakuan, yang menyelidiki pengakuan dan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam proses kebijakan. Integrasi ketiga kerangka analisis ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan peta

komprehensif tentang dinamika politik implementasi kebijakan serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Secara lebih spesifik, kontribusi teori *street level bureaucracy* (Lipsky, 2010) yang pertama, diskresi, yakni ruang kebebasan yang dimiliki petugas lapangan seperti pengelola loket dan operator Sapawarga di Situ Gede ketika menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya tercakup dalam prosedur resmi, misalnya saat melayani pengunjung yang tidak memiliki akses digital. Kedua, mekanisme penanggulangan (*coping mechanism*), yaitu cara-cara yang dikembangkan sendiri oleh petugas garis depan untuk tetap bisa bekerja di tengah beban yang tinggi dan sumber daya yang terbatas. Ketiga, kesenjangan kebijakan-praktik (*policy-practice gap*), yaitu jarak yang kerap muncul antara apa yang dirancang pembuat kebijakan di tingkat atas dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Ketiga konsep ini kemudian dipadukan dengan kerangka Redistribusi dan Rekognisi Nancy Fraser guna melihat secara menyeluruh kebijakan Sapawarga di Situ Gede berdampak pada pedagang kecil dan masyarakat yang selama ini paling merasakan langsung akibatnya. (Lipsky, 2010)

2.1 Tabel Kerangka Pemikira

